

JENGAH DAN TRANSFORMASI NILAINYA

I Putu Sastra Wingarta (Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta)

(sastrawing@yahoo.co.id)

Irwan Abdullah (Lembaga Ketahanan Nasional RI)

Djoko Suryo (Lembaga Ketahanan Nasional RI)

Abstrak

Globalisasi dengan kandungan ancamannya, terus mendera Bali dalam kapasitasnya sebagai sebuah pulau dengan keunikan alam dan budaya yang dimiliki, yang saat ini menjadi salah satu provinsi dari 33 propinsi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, seberapa besar ancaman yang mendera Bali kontemporer, serta peran jengah dalam menghadapinya. Ditemukan dalam tulisan ini, jengah dengan transformasi nilai-nilai yang dikandungnya berkontribusi positif dalam menghadapi ancaman itu serta mampu memberikan jaminan kelangsungan masa depan Bali dengan keunikan yang dimilikinya. Dengan melakukan transformasi terhadap nilai-nilai jengah, Pemprov Bali berhasil meningkatkan good governance-nya serta nasionalisme aparaturnya, yang mampu memberikan dampak positif dalam upaya menangkal derasnya ancaman terhadap keunikan yang dimiliki Bali.

Globalization with its threat that continuously plaguing Bali, currently a province of Indonesia in its capacity as an island with natural and cultural uniqueness. This study aims to find out, how big a threat that plagued contemporary Bali, and the role of embarrassment (jengah) in the face. The study finds that embarrassment (jengah) with the transformation of the values they contain contribute positively in the face of threat and is able to guarantee the future sustainability of Bali with its uniqueness. By transforming the values of embarrassment (jengah), Bali provincial government managed to improve their good governance and the nationalism of its apparatus, capable of providing a positive impact in the swift efforts to deter threats to the uniqueness of Bali.

Kata kunci: Jengah, transformasi nilai, dan Bali kontemporer

A. Pendahuluan

Menyelamatkan Bali dengan keunikan budaya dan alam yang dimiliki, merupakan persoalan terbesar yang tidak pernah berhenti dihadapi dan ditangani oleh pemerintahan Bali beserta pemangku kepentingan Bali lainnya. Globalisasi yang selalu dituding sebagai biang keladi dari tergerusnya keunikan budaya dan kelestarian alam di Bali, adalah gerak alami dari perubahan alam beserta isinya yang tidak akan pernah bisa dibendung oleh kekuatan apapun, kecuali mampu menyikapinya dengan tepat guna dan tepat sasaran berkaitan dengan tujuan hidup. Masyarakat Bali Hindu sangat meyakini akan keunikan budaya dan alam yang dimilikinya, yang selama ini diyakini telah mampu memberikan penghidupan dan jalan kehidupan sesuai tuntunan ajaran Hindu. Konsep *tri hita karana* atau tiga penyebab menuju kebahagiaan menurut ajaran Hindu Bali, yaitu dengan jalan menciptakan keseimbangan hidup antara hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan alamnya serta manusia dengan Tuhannya, adalah konsep menuju kondisi *moksartham jagatdhitā ya ca iti dharma* atau kebahagiaan lahir batin di dunia dan akhirat berlandaskan *dharma* atau kebenaran dan kebajikan. Dengan konsep *tri hita karana* menurut ajaran Hindu itu, diyakini, bahwa hidup akan dapat dijalani dengan baik dan benar.

Kekhawatiran akan masa depan Bali dengan keunikan alam dan budaya yang dimiliki dari ancaman globalisasi merupakan persoalan yang terus dialami Bali. Kekhawatiran itu muncul sejak tumbuh kesadaran dan pemahaman bahwa Bali adalah keunikan tersendiri dari sebuah pulau, yang saat ini menjadi salah satu propinsi dari 33 propinsi di Indonesia, dengan penduduk mayoritas beragama Hindu Bali, di tengah-tengah mayoritas masyarakat Indonesia yang Muslim, serta nilai-nilai universal yang mengglobal. Kekhawatiran akan masa depan Bali dengan keunikan yang dimilikinya, sudah berlangsung sejak jaman kolonial dulu. Hal itu dibuktikan oleh sikap pemerintah kolonial pada jamannya melalui program-program, yang dikatakan sebagai upaya penyelamatan agama dan budaya Bali. Program itu dinamakan politik etis (*ethische politiek*). Namun, politik etis pemerintah kolonial Belanda yang dipraktikkan pada dekade 1920-an, oleh Gouda, justru dikatakan sebagai politik ‘musang berbulu ayam’ atau ‘serigala berbulu domba’, karena politik ini dikemas sedemikian rupa, yang menunjukkan seolah-olah pemerintah

kolonial Belanda sangat memahami dan menghargai makna adat atau tradisi setempat, di balik agenda terselubung pemerintah kolonial yang penjajah dan penghisap sumber daya setempat.

Dalam praktik politik etis, pemerintah kolonial melakukan kolaborasi, dengan memberi peran kembali kepada pihak puri atau raja-raja, dalam mengatur kehidupan sosial masyarakatnya, sehingga pemerintah kolonial dapat berlindung dari kontak langsung dengan masyarakat setempat, yang dirasa sangat tidak efektif dan efisien, melelahkan dan penuh risiko. Politik etis adalah politik yang memberi peran kembali kepada puri atau raja-raja untuk menjalankan kehidupan sosialnya berdasarkan adat dan budaya Bali, yang sebelumnya dipegang langsung oleh pemerintah kolonial dengan *direct role*, menggunakan cara-cara pemerintah kolonial yang modern pada jamannya. Dengan praktik politik etis ini, justru tumbuh subur praktik feodalisme yang hanya menguntungkan pihak kolonial dan golongan kecil masyarakat Bali dari pihak puri atau raja-raja. Politik etis tidak memberi jawaban atas kepentingan Bali pada jamannya, menjamin kesejahteraan masyarakatnya lahir bathin dengan konsep *tri hita karana*. Gouda menyebut politik etis pemerintah kolonial sebagai bentuk pemberlakuan kewajiban kerja yang lebih feodal atas para petani yang sudah sangat miskin, dengan alasan demi melindungi pulau ini dari misionaris Kristen guna melestarikan budaya Bali "autentik" untuk generasi mendatang dalam semua kejayaan artistiknya. Kondisi serta situasi seperti ini, sejatinya sudah menumbuhkan sikap *jengah* masyarakat Bali secara kolektif atau para petani yang merasa sangat dirugikan, dengan pemberlakuan politik semacam itu. Alasan pelestarian alam dan budaya dari politik etis, yang menganggap modernisasi adalah ancaman serius bagi kelangsungan hidup Bali di masa depan, tidak di ikuti oleh praktik dan upaya-upaya mensejahterakan rakyat. Yang terjadi justru pemiskinan rakyat yang sudah miskin karena praktik diskriminatif dan pemerasan pihak pemodal dengan kaum feodal terhadap rakyat.

Sesudah masuknya seluruh wilayah Bali ke dalam kerajaan kolonial Belanda pada awal abad ke -20, pemerintah kolonial Hindia menggairahkan kembali sistem kasta tradisional Hindu Bali yang "eksotis", dengan cara menghidupkan kembali tata-nama kuno dan mengembalikan kedudukan penguasa pulau yang bersifat turunturun. Dengan demikian, pegawai sipil kolonial dapat berlindung di

balik bahu kecil orang-orang Bali berkasta tinggi, yang menggunakan kebangkitan tradisional mereka dengan bebas. Mereka memperluas penguasaan tanah sehingga merugikan 94 persen penduduk pulau tanpa kasta (*kasteloos*)". Pemerintah kolonial Belanda sangat jeli melihat titik lemah tatanan sosial yang berlaku dalam masyarakat Bali yang dapat dimanfaatkan untuk keuntungan pemerintah kolonial.

Dengan menggunakan politik etis, pemerintah kolonial Belanda dapat membatasi kemungkinan oposisi politik terbuka dengan masyarakat Bali. Politik etis mendorong konflik politik dan sosial di kalangan orang Bali sendiri, terutama disepanjang silsilah kasta dan kelas serta di kalangan puri, dan tidak membangkitkan solidaritas melawan Belanda. Pada tahun 1920-an contohnya, Bali mengalami debat publik yang panas perihal hak-hak istimewa kasta, dimana kaum jelata (sudra) yang terdidik berhadapan dengan para wakil konservatif dari tiga kasta tertinggi (*tri wangsa*)".¹ Fenomena seperti ini terus berlangsung sampai jaman revolusi dan pasca kemerdekaan, walau sering berlangsung dibawah permukaan, dengan topik kemasam di seputar menjaga kelestarian Bali dengan alam dan budayanya namun implementasinya tetap dikemas dengan jiwa politik etis, yang tidak memberi jawaban atas persoalan yang paling mendasar, yaitu kesejahteraan masyarakat Bali kebanyakan berdasar konsep *tri hita karana*. Kesadaran akan kondisi dan situasi seperti ini, terus memicu dan memacu sikap jengah masyarakat Bali kebanyakan masa kini atau masyarakat Bali kontemporer, yang sangat menentang praktik-praktik diskriminatif para pemodal dan kaum feodal dalam sistem kehidupan yang demokratis.

Penggunaan dan pemilihan politik etis pemerintah Belanda dalam menjalankan strategi pemerintahannya di negeri jajahan, adalah strategi yang bukan tanpa alasan. Pemilihan dan penggunaan strategi itu berkaitan dengan upaya melemahkan kekuatan internal masyarakat Bali dengan cara menciptakan konflik politik dan sosial tidak berkesudahan dikalangan orang Bali sendiri, terutama di sepanjang silsilah kasta dan kelas dalam sistem pelapisan masyarakat Bali. Kesibukan dalam menghadapi konflik internalnya, menjadikan masyarakat Bali tidak memiliki soliditas dalam menghadapi

¹ Geoffrey Robinson, *Sisi Gelap Pulau Dewata, Sejarah Kekerasan Politik*, (Yogyakarta: LkiS, 2005), h. 20-21

kesewenang-wenangan pemerintah kolonial yang sangat menjajah dan menghisap sumber daya Bali. Dengan kekuatan modal yang dimilikinya, pemerintah kolonial Belanda sebagai pemodal, yang mampu menjalankan politik etisnya dengan cerdas, lalu mengeruk keuntungan besar dari sumber daya yang dimiliki Bali, khususnya dari hasil pertanian dari para petani yang sudra atau *jaba wangsa*, serta perbudakan dari para budak yang juga sudra. Fenomena dan paradigma seperti ini, tetap berlangsung pada era Bali kontemporer sekarang ini, dengan kemampuan pemodal yang berubah bentuk, dari bentuk awal sebagai kolonial yang *state actor*, menjadi pemodal yang *non state actor*, terhadap masyarakat Bali kebanyakan yang tidak punya modal dan miskin.

Kajian yang berkaitan dengan sikap jengah dalam fenomena paradigma implementasi politik etis dalam kehidupan masyarakat Bali telah banyak dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu yang hasilnya relevan dengan hasil penelitian ini antara lain penelitian Howe, Robinson, Kembar Kerepun dan Atmadja.² Pasca ledakan bom Bali I tahun 2002 serta bom Bali II tahun 2005, di Bali marak didengungkan tentang Ajeg Bali. Hampir setiap orang Bali, dari kalangan bawah sampai atas, berbicara masalah Ajeg Bali yang secara sederhana diartikan sebagai upaya untuk melindungi dan melestarikan budaya Bali, dari intervensi pihak luar Bali. Gaung Ajeg Bali menjadi demikian tinggi, karena kontribusi besar yang diberikan oleh media terbesar dan berpengaruh di Bali, yang pemilik saham terbesarnya orang Bali.

Walau begitu, dalam Mencintai Diri Sendiri, Gerakan Ajeg Bali Dalam Sejarah Kebudayaan Bali 1910-2007, diuraikan dalam kesimpulannya bahwa Ajeg Bali adalah upaya sepihak para intelektual organik yang memperoleh atau diberikan kekuasaan berbicara oleh penguasa untuk menciptakan simbol-simbol baru kebudayaan yang

² Leo Howe, *The Changing World of Bali, Religion, Society and Tourism*, (The Taylor & Francis e-Library, 2005), Made Kembar Kerepun, *Mengurai Benang Kusut Kasta, Membedah Kiat Pengajegan Kasta di Bali*. (Denpasar: Panakom, 2007), Geoffrey Robinson, *Sisi Gelap Pulau Dewata, Sejarah Kekerasan Politik*, (Yogyakarta: LkiS, 2005), Nengah Bawa Atmadja, *Ajeg Bali, Gerakan, Identitas, dan Globalisasi*, Yogyakarta: LKiS, 2010).

berwajah banyak (multilingual) demi menjaga kebudayaan Bali. Upaya itu dilakukan dengan cara menjadikan Bali sebagai sebuah kata benda konkrit milik orang-orang Bali Hindu, sehingga budaya-budaya yang diciptakan dan digandengkan dengan Bali harus atau dianggap berasal dari warisan peradaban Hindu zaman keemasan raja-raja Bali, yang di dalamnya tersembunyi marginalisasi *jaba wangsa*. Kondisi yang demikian ini jelas mendapat tantangan dan penolakan dari internal masyarakat Bali sendiri khususnya dari *jaba wangsa*, yang tidak hanya sekedar memarginalkannya, tetapi juga menyimpang dari prinsip-prinsip kehidupan demokratis yang universal yang ditandai dengan egalitarian. Satu abad, sejak 1910 sampai saat ini 2010 dapat dilacak tentang gerakan Ajeg Bali yang lebih melakukan penekanan terhadap pelestarian budaya Bali namun di dalamnya terselubung upaya-upaya jamak untuk kepentingan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan dari kelompok tertentu yang saling berbenturan satu dengan yang lainnya.

Selanjutnya dalam Ajeg Bali, Gerakan, Identitas, dan Globalisasi diuraikan bahwa masyarakat Bali kontemporer sedang mengalami sakit akibat berbagai penyakit yang dideritanya akibat serangan negative globalisasi dan modernisasi (high modernism) yang mendera Bali dalam kapasitasnya sebagai daerah tujuan wisata. Walau begitu, Atmaja mengajak masyarakat Bali untuk tidak serta merta menyalahkan globalisasi dan modernisasi itu semata. Yang paling penting semestinya bagaimana mengatasi keterjeratan terhadap kebudayaan putih-global. Masyarakat Bali semestinya mengendorkan keterjeratannya pada Agama Pasar, konsumerisme, hedonisme, individualisme, wajahisme, penampilanisme, dan isme-isme lainnya. Dalam konteks ini agama Hindu bisa berfungsi sangat penting, mengingat dimensi-dimensi yang terkandung didalamnya tidak hanya berdimensi ritualistik, tetapi juga intelektual, sosial, ideologis dan eksperiensial”.³ Atmaja lebih menekankan pada *jengah* orang Bali sendiri dalam kehidupan, yang sedang dalam ‘keterjeratan’ ideologi pasar. Ketergantungan orang Bali terhadap pendaat sangat tinggi. Mulai dari ketergantungan terhadap tukang cukur dari Madura, kuli

³ Nengah Bawa Atmadja, *Ajeg Bali, Gerakan, Identitas, dan Globalisasi*, (Yogyakarta: LKiS, 2010), h. 501.

bangunan, buruh panen dari Banyuwangi sampai dengan sektor-sektor perekonomian lainnya yang ditinggalkan oleh orang Bali sehingga diambil alih oleh pendatang. Atmaja sangat menuntut sikap *jengah* masyarakat Bali dalam menyikapi keberlangsungan globalisasi dengan modernisasinya (*high modernism*) yang mengandung berbagai ancaman bagi keunikan alam dan budaya Bali.

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa beberapa penelitian memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Kesamaannya terletak pada penelitian yang menyangkut kekhawatiran akan masa depan Bali dengan keunikan yang dimiliki, namun memiliki perbedaan pada metode fenomenologinya serta lingkup dan lokasi penelitiannya. Penelitian-penelitian terdahulu, tidak ada yang mengungkap secara tuntas tentang peran jengah dalam menjamin keberlangsungan masa depan Bali dengan keunikan yang dimilikinya sesuai tuntunan yang digariskan oleh ajaran Hindu. Mengingat betapa menariknya fenomena masyarakat Bali dalam menyikapi globalisasi dengan modernisasi serta nilai-nilai universal yang dikandungnya mendera Bali sejak jaman pra kemerdekaan dulu hingga saat ini, maka perlu dilakukan penelitian akan peran jengah dalam menetralkan dampak negatif globalisasi atau modernisasi itu terhadap keunikan Bali berbasis budaya menurut ajaran agama Hindu Bali.

Penelitian ini dilakukan terhadap pemerintah daerah provinsi Bali. Hal-hal yang perlu diidentifikasi dalam penelitian ini antara lain tentang karakteristik Bali dengan keunikan yang dimiliki serta kapasitasnya sebagai daerah tujuan wisata, kondisi pemerintahannya serta tantangan pembangunan yang dialami dalam rangka mensejahterakan masyarakatnya. Perlu juga dijelaskan bahwa, dinamika pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi Bali di Bali dalam kapasitasnya sebagai daerah tujuan wisata, membawa konsekuensi atau mengundang berbagai penyakit sosial dalam masyarakat semakin marak, kesenjangan sosial semakin dalam, serta jauh dari konsep hidup *tri hita karena* menuju *moksartham jagatdhita ya ca iti dharma*. Selanjutnya, berdasar identifikasi masalah tersebut maka disusun rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana nilai-nilai *jengah* ditransformasi dalam lingkungan pemerintah daerah provinsi Bali yang membawa pengaruh terhadap perwujudan *good governance* dalam sistem pemerintahannya, kemudian bagaimana

transformasi nilai-nilai *jengah* itu membawa pengaruh terhadap praktik nasionalisme di lingkungan aparaturnya Pemprov Bali, serta hasil-hasil pembangunan yang dapat dicapai di Bali dengan melakukan transformasi nilai-nilai *jengah*, yang dapat menjamin kelangsungan hidup Bali dengan keunikan yang dimilikinya.

Penulis merasa tertarik untuk melakukan pendalaman apakah *jengah* itu berhubungan secara positif dengan kinerja atau praktik *good governance* dan praktik nasionalisme. Ketertarikan penulis melakukan pendalaman terhadap peran *jengah* dalam menghadapi dampak negatif globalisasi, sejalan dengan pernyataan berbagai kalangan di Bali, mulai dari tokoh masyarakat sampai dengan pejabat dan akademisi yang meyakini bahwa *jengah* sangat dibutuhkan dalam menghadapi era persaingan global, karena sikap *jengah* diyakini sebagai sikap yang mampu memperkuat diri untuk tampil berkualitas.

B. Jengah dan Transformasi Nilainya

Dalam menghadapi era kesejagatan atau globalisasi, Bali yang memiliki keunikan adat dan budaya dituntut untuk arif menyikapi gempuran arus negatif pengaruh globalisasi, selain hal-hal positif yang dibawanya. Terlebih-lebih Bali sebagai daerah tujuan wisata yang harus membuka diri dari dunia luar dengan berbagai budaya yang mempengaruhinya. Kekhawatiran akan masa depan Bali dengan keunikan yang dimiliki, sangat berkaitan dengan kekhawatiran konsep *tri hita karana* yang tidak terkendali akibat intervensi berlebihan kepentingan duniawi dibandingkan kepentingan surgawi. Bali adalah pulau kecil dengan luas sekitar 5.636,66 km² atau 0,29 % dari luas Indonesia seluruhnya, merupakan salah satu provinsi dari 33 provinsi di Indonesia yang sangat mengandalkan kehidupannya dari sector pariwisata. Karena alam dan budayanya yang unik, menjadikan Bali memiliki daya tarik sendiri di bidang pariwisata dan menjadi andalan sector pariwisata nasional. Juga, karena keunggulan pariwisata yang dimiliki, Bali menjadi di persimpangan jalan dalam menatap masa depannya.

Pariwisata menjadi pisau bermata dua, yang membuat Bali harus menghadapi persoalan yang dilematis antara sumber kehidupan dan sumber penghancuran alam dan budaya Bali. Terjadi tarik-menarik yang sangat kuat antara 'budaya pariwisata dengan

pariwisata budaya'. Pemahaman tentang 'budaya pariwisata' yang diterjemahkan sebagai budaya yang menjadikan pariwisata sebagai perspektifnya, menjadikan budaya sebagai budak pariwisata. Untuk kepentingan pariwisata, budaya generik yang dimiliki Bali banyak dikorbankan. Kearifan budaya lokal yang menjunjung tinggi pelestarian alam dan lingkungan, untuk mewujudkan konsep *tri hita karana*, menjadi korban kepentingan pariwisata yang menuntut dikembangkannya berbagai infra-struktur pariwisata yang semakin meminggirkan kepentingan pelestarian alam dan lingkungan. Tekad untuk menjadikan Bali sebagai pariwisata budaya, atau pariwisata yang dibangun dengan menggunakan perspektif budaya hanya menjadi slogan semata dan utopis. Atas dasar pemikiran demikian, sikap jengah masyarakat Bali sangat diperlukan, terlebih-lebih aparatur pemerintah daerahnya yang sangat berperan dalam pembangunan Bali, mulai dari perencanaan sampai dengan pengendaliannya.

C. Bali, Pemerintahan, dan Tantangan Pembangunannya

Bali, selain pulau, merupakan salah satu provinsi, dari 33 provinsi di Indonesia. Sebagai pulau tujuan wisata, nama Bali sudah terkenal di tataran nasional maupun internasional. Ketenarannya berkaitan dengan julukan-julukan yang diberikan kepadanya seperti *The Island of Gods*, *The Island of Paradise*, *The Island of Thousand Temples*, *The Morning of the World* sampai dengan predikat terbarunya *The Island of Love*, sesaat setelah dibuat film yang dibintangi Julia Roberts berjudul *Eat Pray Love*, yang lokasi pengambilan gambarnya di Bali tahun 2010.

Secara administrasi, Provinsi Bali terbagi menjadi delapan kabupaten dan satu kota, 57 kecamatan, 715 desa/kelurahan, 1483 Desa Pekraman dan 3625 Banjar Pekraman. Terdapat keunikan dalam sistem pemerintahan di Bali, karena adanya perpaduan antara sistem pemerintahan yang menganut sistem yang berlaku secara nasional seperti kecamatan dan kelurahan, serta sistem yang berdasarkan adat yang juga dilindungi oleh undang-undang seperti desa pakraman dan banjar pakraman. Desa pakraman adalah "kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat

Hindu secara turun-temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri” (pasal 1 no urut 4 Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman). Banjar pakraman adalah, kelompok masyarakat yang merupakan bagian dari desa pakraman. Dengan demikian, desa pakraman merupakan organisasi masyarakat Hindu Bali yang berdasarkan kesatuan wilayah tempat tinggal bersama dan spiritual keagamaan yang paling mendasar bagi pola hubungan dan pola interaksi sosial masyarakat Bali. Pasal 6 Perda Provinsi Bali No 3 Tahun 2001 mengatur tentang desa pakraman yang mempunyai wewenang: menyelesaikan sengketa adat dan agama dalam lingkungan wilayahnya dengan tetap membina kerukunan dan toleransi antar-krama desa sesuai dengan awig-awig dan adat kebiasaan setempat; turut serta menentukan setiap keputusan dalam pelaksanaan pembangunan yang ada di wilayahnya, terutama yang berkaitan dengan *tri hita karana*.

Masing-masing desa pakraman sesuai dengan *tatwa* (filsafat) dan *dresta* (aturan) yang ada, memiliki otonominya sendiri-sendiri dengan *desa mawa cara* (cara-cara yang berlaku di desanya), yang dituangkan dalam aturan-aturan atau ketentuan yang berlaku di desanya yang biasa disebut dengan awig-awig, yang bisa berbeda antara desa pakraman yang satu dengan desa pakraman yang lainnya. Kondisi seperti ini menjadikan Bali berpotensi dan sangat rentan terhadap konflik adat atau konflik yang mengatas namakan adat yang bersumber dari awig-awig yang berbeda antara desa pakraman satu dengan desa pakraman yang lainnya. Terlebih-lebih potensi konflik itu disusupi dan ditunggangi oleh berbagai kepentingan politik dan ekonomi serta pemodal pariwisata masa kini yang justru sangat menodai konsep-konsep filsafat yang bersumber dari ajaran Hindu Bali yang menjadi dasar dalam kehidupan desa pakraman seperti “*paras-paros*”, *sagilik-saguluk*, *salunglung sabayantaka*” (*musyawarah-mufakat*). Praktik-praktik kehidupan di lingkungan desa pakraman masa kini, selain peruntukannya menjaga, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai budaya Bali untuk kepentingan pembangunan di segala bidang terutama di bidang keagamaan, kebudayaan, dan kemasyarakatan di Bali, namun praktik-praktik

kehidupan itu juga sudah banyak dicemari oleh kepentingan duniawi semata, yang justru sangat bertentangan dengan budaya berdasar pertimbangan surgawi dengan nilai-nilai kerelegiusannya. Akibatnya konflik adat atau konflik mengatas namakan adat antar desa pakraman serta antar banjar pakraman di Bali marak terjadi, bermotifkan politik dan ekonomi serta kepentingan pemodal pariwisata.

Selain marak konflik adat atau konflik mengatas namakan adat yang melanda Bali kontemporer, pariwisata Bali juga mendapat kritikan pedas dari wartawan majalah Time Andrew Marshal pada April 2011, yang menulis tentang pariwisata Bali yang mengecewakan dalam judul tulisannya; *Holidays in Hell: Bali's Ongoing Woes*, Marshall menyampaikan kekecewaannya berlibur di Bali, bagai berlibur di neraka karena berbagai kekurangan yang dimiliki Bali sebagai daerah tujuan wisata berkelas dunia. Marshal menyoroti buruknya infra struktur pariwisata Bali seperti masalah ketersediaan air bersih, pemadaman listrik bergilir, sampah yang menumpuk, luapan limbah, perlakuan terhadap tanaman, lalu lintas yang sangat buruk yang macetnya menyerupai kemacetan yang terjadi di ibukota Indonesia Jakarta. Walau Menbudpar Jero Wacik pada saat itu tidak setuju dengan penilaian dan kritik Marshal, namun Gubernur Bali Made Mangku Pastika menilai kritik itu positif untuk kepentingan meningkatkan kualitas kepariwisataan Bali ke depan. Bahkan, Mangku Pastika (MP) sebagai kepala pemerintahan di Bali mengajak masyarakat Bali dan jajaran di pemerintahannya untuk *jengah* menjawab kritikan itu. “Bukannya marah”, katanya.

Pemerintah daerah provinsi Bali, adalah lembaga yang paling bertanggung jawab ketika kritikan yang disampaikan oleh Marshal seperti itu harus ditindak-lanjuti. Ketika Gubernur Bali Mangku Pastika mengajak masyarakat Bali untuk *jengah*, maka aparatatur Pemprov Bali-lah yang paling dituntut untuk menunjukkan keteladanannya terlebih dahulu. Terlebih lebih, kritikan Marshal adalah puncak gunung es dari berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi Bali selama ini. Berbagai permasalahan pembangunan dihadapi Bali yang menjadikan dirinya semakin jauh meninggalkan konsep *tri hita karana*, serta jauh dari falsafah hidup menuju kondisi *moksartham jagatdhita ya ca iti dharma* atau kebahagiaan lahir bathin di dunia dan akhirat berlandaskan dharma atau

kebenaran dan kebajikan. Nilai-nilai universal yang merasuki kehidupan sosial di Bali, tidak seluruhnya dapat diterima dalam budaya Bali yang sangat menekankan kereligiusan berdasarkan ajaran Hindu. Masalah-masalah pembangunan itu meliputi masalah sampah, air bersih dan ledakan penduduk, masalah kemacetan lalu lintas, transportasi dan pembangunan infrastruktur, masalah keamanan, seperti anjing berkeliaran dengan ikutan rabies-nya, demonstrasi anarkhis dan praktik premanisme, konflik antar-orang Bali dengan non dan inter-orang Bali, berbagai penyakit sosial, serta masalah endemisitas kemiskinan dan pengangguran yang terus mendera Bali.

D. Jengah dan Tranformasi Nilainya Untuk Praktik Good Governance

Begitu banyak nilai-nilai atau ajaran agama Hindu terekspresi dan menjadi nilai-nilai budaya Bali, salah satunya adalah jengah, yang dalam bahasa sansekertanya disebut *Hrih* yang diartikan sebagai 'memiliki rasa malu'. Rasa malu itu berkaitan dengan sloka dalam Bhagavadgitha, ketika Arjuna menolak untuk berperang melawan Kurawa. Ketika itu Khresna menasehati Arjuna, agar tidak melakukan perbuatan yang memalukan atau hina, sebagai ksyatria yang menolak berperang. Perang yang akan dilakukan adalah perang melawan *adharma* (kebatilan) dalam rangka menegakkan dharma (kebenaran). Melakukan *jengah* analoginya bagaikan melaksanakan perang, (*urip sekadi perang*) atau jihad, yang memiliki kemiripan dengan etika protestan dan etika Tokugawa. Keberhasilan dari jengah adalah diraihnya kesuksesan, direbutnya kemenangan dan diperolehnya jalan dharma serta berujung pada pemuliaan Tuhan. Dalam konteks budaya, perkataan *jengah* memiliki konotasi sebagai semangat guna menumbuhkan inovasi untuk bangkit dari keterpurukan. *Jengah* merupakan dasar sifat-sifat dinamik yang menjadi pangkal segala perubahan dalam kehidupan masyarakat.

Sifat-sifat dinamik itu berkaitan dengan upaya mempertahankan kelangsungan hidup. Ketahanan itu sendiri diperoleh dari sifat-sifat yang dinamik. Hal ini sesuai dengan pengertian ketahanan dalam ketahanan nasional rumusan Lembaga Ketahanan Nasional RI (Lemhannas RI). Dikatakan bahwa; Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamik segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi,

yang berisi keuletan dan ketangguhan menghadapi ancaman. Kondisi dinamik itu diperoleh dengan melakukan berbagai perubahan sesuai situasi dan kondisi yang dihadapi, sedangkan keuletan dan ketangguhan adalah rasa dan tindakan jengah. Perubahan itu diperlakukan sebagai sebuah keniscayaan, demi menjamin kelangsungan hidup. Bandem⁴ mengatakan bahwa adat budaya yang cenderung kaku dan tidak bisa menyesuaikan diri dengan perubahan, pada gilirannya akan hancur.

Bali menyimpan berbagai masalah dalam mempraktekkan konsep tri hita karena –nya dalam pembangunannya, yang berpotensi menghancurkannya. Untuk menghindari kehancuran, Bali harus jengah dan Bali harus berubah. Tentang perubahan, dikatakan: “...adalah proses dimana kita berpindah dari kondisi yang berlaku menuju ke kondisi yang diinginkan, yang dilakukan oleh individu, kelompok-kelompok serta organisasi–organisasi dalam hal bereaksi terhadap kekuatan–kekuatan dinamik internal maupun eksternal”.⁵ Winardi melanjutkan, bahwa; kondisi yang sedang berlaku, atau yang sedang dihadapi, kurang memuaskan, sehingga diperlukan adanya perubahan untuk mencapai kondisi yang lebih diinginkan. Kondisi yang lebih diinginkan itu adalah kondisi penyelenggaraan kehidupan dalam masyarakat dan pemerintahan yang baik, yang bisa juga disebut atau diganti dengan kata *good governance*. Agar bisa demikian, maka dilingkungan masyarakat dan pemerintahan daerah di Bali harus melakukan transformasi sosial berbasis nilai-nilai jengah.

Sebagai badan atau lembaga pemerintah yang paling bertanggung jawab dalam menjamin kelangsungan hidup Bali kedepan dengan falsafah tri hita karena-nya, pemerintah daerah Provinsi Bali dibawah kepemimpinan Gubernur Mangku Pastika dan Puspayoga, melakukan transformasi nilai-nilai *jengah* dengan melakukan tata kelola pemerintahan yang bersih dan terbuka, melakukan tata kelola pemerintahan yang responsif, melakukan tata kelola pemerintahan yang bertanggung jawab. Dalam penelitian ini

⁴ I Made Bandem, “Menuju Kebangkitan Global Kebudayaan Indonesia (Peran Kebudayaan Dalam Peneguhan Ketahanan Nasional)”. Orasi Ilmiah pada Peringatan HUT ke-41 Lemhannas-RI, 2006, h. 3

⁵ Winardi, *Manajemen Perubahan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 39.

ditemukan, bahwa Pemprov Bali dalam melakukan tata kelola pemerintahan yang bersih dan terbuka telah menjalankan program-program seperti melakukan pakta integritas dilingkungan aparatur pemerintahannya, dalam rangka membangun kesepakatan moral agar tidak melakukan perbuatan tercela dalam melaksanakan tugas. Aparatur pemerintah daerah juga ditemukan berhasil meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi keuangan yang sebelumnya *Disclaimer* menjadi *Wajar Dengan Pengecualian* (WDP), serta upaya-upaya merubah tradisi dan kebiasaan bekerja aparatur pemerintah daerah Bali yang tidak efektif dan efisien menjadi termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya dengan mengawinkan sikap jengah yang *local wisdom* dengan manajemen modern, seperti yang dikatakan motivator Mario Teguh serta ahli marketing Hermawan Kartajaya.

Dalam penelitian ini juga ditemukan, bahwa pemerintah daerah Provinsi Bali dalam melakukan tata kelola pemerintahan yang responsif, melaksanakan berbagai macam program inovatif. Pemerintahan yang responsif, adalah pemerintahan yang mau mendengar dan aspiratif terhadap kehendak masyarakat bawah. Pemerintahan MP-Puspayoga berkomitmen tinggi untuk hal seperti itu. Dalam bahasa lain, pemerintahan MP-Puspayoga yang bermodalkan jengah, berupaya keras untuk melayani masyarakat atau 'jemput bola' dalam menghadapi berbagai permasalahan. Oleh karena itu, dikemas program-program yang memacu aparatur pemerintah daerah Provinsi Bali memanfaatkan hari Sabtu dan Minggu, yang sejatinya sebagai hari libur bagi pegawai negeri, namun digunakan untuk melaksanakan kegiatan sosial mengentaskan kemiskinan. Selain itu program komunikasi sosial *simakrama* serta kebijakan pensiun dan rasionalisasi pegawai, adalah contoh-contoh bentuk program responsive yang bermuara pada terwujudnya *Good Governance*.

Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa pemerintah daerah provinsi Bali dalam melakukan tata kelola pemerintahan yang bertanggung jawab telah melakukan program-program unggulannya, program-program yang diarahkan menjadi program keberpihakan (*affirmative policy*) dari pemerintah daerah provinsi Bali kepada masyarakatnya. Program-program unggulan seperti program Bali Green and Clean, Bali Organic, program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM), serta program Simantri (Sistem Pertanian

Terintegrasi), Bedah Rumah dan Jamkrida (Jaminan Kredit Daerah) Bali Mandara adalah program-program unggulan pemerintah daerah provinsi Bali yang menunjukkan tanggung jawabnya sebagai pemerintah daerah yang harus menjamin keamanan dan kesejahteraan masyarakat atau rakyatnya. Semua bermuara pada terciptanya *good governance*. Program-program ini digagas sejak pemerintahan MMP-Puspayaga sebagai bentuk program unggulan pemprov Bali dalam rangka *jengah* untuk bertanggung jawab menciptakan keamanan dan kesejahteraan.

E. *Jengah* dan Transformasi Nilainya untuk Praktik Nasionalisme

Ketika nasionalisme yang diartikan sebagai *grand solidarity* oleh Ernest Renan yang tidak mengenal perbedaan etnis, religi, keturunan tetapi karena kesamaan jiwa (*soul*) yang sangat menghargai kesetaraan, egalitarian, dan *equality* yang menjadi dasar kehidupan demokratis, maka nasionalisme di Bali menjadi nasionalisme yang gamang dipraktekkan. Kegamangan itu bersumber dari sistem pelapisan masyarakat Bali yang sudah terlanjur terbentuk berdasar keturunan, menjadi canggung diaplikasikan dalam sistem sosial seperti yang dituntut oleh kehidupan demokratis. Menjadi sulit membangun solidaritas besar atau *grand solidarity*, seperti yang dikehendaki oleh paham nasionalisme, akibat faktor pelapisan masyarakat berdasar keturunan itu, yang biasa disebut dengan kasta. Oleh karena itu, ketika nasionalisme sebagai ideologi baru yang ditawarkan untuk mengganti ideologi feodalisme dan ideologi imperialisme penjajah, maka kaum nasionalis di Bali harus berjuang untuk membangun kebersamaan besar berdasarkan jiwa dan kebersamaan tujuan. Kondisi seperti ini terus dialami oleh masyarakat Bali dalam kehidupan kontemporer yang menuntut penggunaan manajemen modern dengan sistem demokratisnya, di tengah-tengah kehidupan adat, budaya, dan religi yang masih mempraktikkan kehidupan berdasar pelapisan itu. Kondisi seperti ini dialami dalam sistem pemerintahan di Bali sejak awal-awal terbentuknya pemerintahan daerah di Bali. Walau demikian, dalam penelitian ini ditemukan, upaya-upaya untuk merubahnya, atau paling tidak untuk tidak mencampur-adukkannya antara sistem pelapisan dalam

masyarakat adat dengan praktik manajemen modern yang diberlakukan dilembaga pemerintahan.

Pemerintahan daerah Provinsi Bali yang dipimpin oleh Made Mangku Pastika, sangat menyadari akan kondisi yang demikian, yang memaksanya harus jengah, dan mengajak aparturnya menyikapi kondisi itu secara rasional, proporsional, dan profesional, tanpa harus mengundang permasalahan baru akibat menyentuh adat, budaya dan religi yang menjadikan berbagai bentuk kegaman dalam praktik nasionalisme. Nasionalisme dengan kebersamannya, menuntut persatuan dan kesatuan agar bisa ketujuan bersama yang telah disepakati. Tujuan itu sudah tentu sebuah kondisi yang lebih baik dibandingkan kondisi sebelumnya. Untuk itu harus *jengah*. Pemahaman seperti ini dijadikan pegangan oleh MMP dalam mengendalikan pemerintahannya.

Selain itu, dalam penelitian ini juga ditemukan upaya Pemprov Bali dalam meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah Provinsi Bali dengan menyadarkan aparturnya yang hampir seratus persen berasal dari etnis Bali untuk lebih menyadari akan arti dan makna nasionalisme seperti yang dimaksud Weber. Dikatakan bahwa, nasionalisme yang dimaksud adalah nasionalisme seperti yang dikatakan sebagai sesuatu yang “.....berhubungan sangat rapat dengan kepentingan-kepentingan ‘prestise’.....pemeliharaan keunikan kelompok atau sekurang-kurangnya pada tidak tergantikannya nilai-nilai budaya yang harus dilestarikan dan dikembangkan hanya melalui pemeliharaan keistimewaan kelompok”.⁶ Dengan melakukan penekanan akan makna nasionalisme yang demikian, aparat pemerintah daerah Bali diajak untuk meningkatkan kinerjanya dengan berbagai program inovatif, seperti program jengah bersama membangun solidaritas, *jengah* bersama mengikis feodalisme dan patron-klien negatif, serta program *jengah* bersama mengajegkan Bali.

Dalam program jengah bersama membangun solidaritas, dilaksanakan program *jengah*, membangun kejuangan, program

⁶ Max Weber, *Sosiologi from Max Weber: essays in Sociology*. Oxford: Oxford University Press, 1946. Diterjemahkan oleh Noorkholis dan Tim Penerjemah Promothea. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Yogyakarta, 2009), h. 211.

jengah, untuk maju dan modern, serta program *jengah*, untuk menjadi ikon pasangan nasionalis bagi Gubernur dan Wagub yang dianggap sebagai pasangan yang berasal dari dua lapisan masyarakat tradisional Bali modern, yaitu dari lapisan *jaba wangsa (sudra)* dan *tri wangsa*, yang menjadi satu kesatuan dalam mengemban tugas untuk kepentingan Bali dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dikotomi sistem pelapisan masyarakat Bali yang membedakan antara lapisan *jaba wangsa (sudra)* dan *tri wangsa*, dicegah merasuk dalam sistem manajemen modern yang digunakan dalam mengelola sistem pemerintahan di Bali.

Dalam program *jengah* bersama mengikis feodalisme dan patron-klien negatif, dalam penelitian ini ditemukan dilaksanakannya berbagai program manajemen modern dalam rangka menghindari praktik-praktik feodalisme dan patron-klien negatif yang seakan menjadi gejala endemik dalam sistem kehidupan masyarakat Bali. Endemisitas praktik-praktik feodalisme dan patron-klien negatif dalam sistem pemerintahan di Pemprov Bali tidak terlepas dari sistem pelapisan yang masih berlaku dalam masyarakat adat Bali. Bagus⁷ mengatakan bahwa dalam sistem pelapisan masyarakat Bali dikenal istilah *Triwangsa* dan *Jabawangsa*. *Tri Wangsa* dan *Jaba Wangsa*, adalah empat atau catur lapisan masyarakat yang dipilah-pilah menurut pemahaman kasta. *Tri wangsa* meliputi wangsa Brahmana, Ksatria, dan Wesya, sedangkan *Jaba Wangsa* adalah kaum Sudra. Pelapisan masyarakat seperti ini mewarnai kehidupan sosial masyarakat Bali zaman kerajaan dulu dan dilestarikan oleh pemerintahan kolonial Belanda dengan politik etisnya.

Pemerintahan kolonial Belanda dengan politik etisnya, dapat memetik keuntungan dari sistem pelapisan masyarakat yang demikian, paling tidak dalam pelaksanaan program kerja rodinya serta program penjualan budak. Sumber daya kerja rodi dan penjualan budak dapat diperoleh dari kaum sudra atau *jaba wangsa* yang jumlahnya mencapai sekitar 85 persen dari seluruh jumlah penduduk Bali. Sistem pelapisan seperti ini, menjadikan garis keturunan pada

⁷ I Gusti Ngurah Bagus, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1970), h. 36

masyarakat Bali Hindu, sebagai garis hidup yang harus diterima dengan berbagai konsekuensinya. Orang Bali Hindu yang berasal dari keturunan sudra atau *jabawangsa* harus dapat menerima garis kehidupannya yang tidak akan berubah sebagai budak yang siap diperjual belikan serta siap untuk kerja rodi tanpa upah. Berdasar sistem pelapisan masyarakat Bali Hindu yang seperti ini feodalisme tumbuh subur. Akibatnya, pada awal-awal kemerdekaan NKRI yang menawarkan nasionalisme berbasis egaliterian sebagai ideologi pengganti feodalisme, orang-orang Bali Hindu yang sebagian besar dari jabawangsa menyambut baik tawaran itu. Walau demikian, tidak sedikit juga dari kalangan *triwangsa* yang sangat mendukung dihapusnya feodalisme.

Wijaya memberikan pengertian tentang *Tri Wangsa* dan *Jaba Wangsa*, bahwa; *Jaba Wangsa* dapat disebut sebagai bangsawan Bali Kuno, sedangkan *Tri Wangsa* bangsawan Bali Baru. Kelompok ini dibatasi oleh garis demarkasi sejarah, yakni periode sebelum dan sesudah kekuasaan Majapahit di Bali. Sebelum kekuasaan Majapahit disebut sebagai Bali kuno, sedangkan Bali baru selama kekuasaan Majapahit. Pada masa kolonial Belanda, yang mendapatkan kondisi sosial masyarakat Bali sebagai kondisi sosial peninggalan kekuasaan Majapahit, politik kebudayaan pemerintah Belanda memposisikan kaum *Tri Wangsa* sebagai kelompok yang memiliki hak-hak yang jauh lebih tinggi dan istimewa dibandingkan kelompok *Jaba Wangsa* atau *Sudra Wangsa*. Made Kembar Kerepun⁸ mengupas tentang kekusutan pemaknaan kasta ini dalam bukunya *Mengurai Benang Kusut Kasta, Membedah Kiat Pengajegan Kasta di Bali*. Gambaran kondisi sosial serta sistem pelapisan masyarakat Bali, seperti yang digambarkan di atas, adalah gambaran kondisi sosial yang memberi peluang praktik-praktik feodalisme dan patron-klein terus berlangsung, di tengah-tengah tuntutan melaksanakan manajemen modern dalam manajemen pemerintahan daerah. Pemerintah Daerah Provinsi Bali bertekad dalam melaksanakan manajemen modernnya, tidak terpengaruh dan mencampur-adukkan praktik-praktik feodalisme dan

⁸ Made Kembar Kerepun, *Mengurai Benang Kusut Kasta, Membedah Kiat Pengajegan Kasta di Bali*. (Denpasar: Panakom, 2007), h. 23.

patron klien negatif dalam birokrasi sistem pemerintahan daerah Provinsi Bali.

Dalam program *jengah* bersama mengajegkan Bali dalam penelitian ini ditemukan berbagai program yang dikemas Pemprov Bali untuk menciptakan ketahanan atau keajegan Bali di berbagai aspek kehidupannya, meliputi aspek geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Dalam suatu kesempatan, tepatnya saat dilaksanakan simakrama di wantilan DPRD Provinsi Bali pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2010, Gubernur MMP mengajak masyarakat Bali untuk tidak terlalu mempermasalahkan tentang istilah Ajeg Bali Atau Bali Ajeg. “...yang penting mari kita bersama-sama terus bertekad untuk mewujudkan Bali Mandara, Bali yang Agung, The Great Bali, Bali yang Maju, Aman Damai dan Sejahtera” Bali Mandara, yang berarti Bali yang Agung atau The Great Bali, sekaligus sebagai akronim dari Bali yang Maju, Aman Damai dan Sejahtera, adalah yang sudah menjadi visi pembangunan Bali dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi Bali tahun 2008-2013, dan sudah menjadi Peraturan Daerah atau Perda Nomor 9 Tahun 2009. Berbagai program yang disusun oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD), serta unit-unit kerja di lingkungan Pemprov Bali, diarahkan untuk mendukung terciptanya ketahanan atau keajegan Bali pada masing-masing aspek kehidupan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD atau unit kerja. Dalam kurun waktu tiga tahun sejak 2008 sampai dengan 2011 pemerintahan yang dipimpin pasangan MP-Puspayoga, hasil evaluasi yang diperoleh dalam penelitian ini, ditemukan kemajuan dan peningkatan ketahanan atau keajegan Bali pada hampir seluruh aspek kehidupan secara kualitas maupun kuantitas.

F. Kesimpulan

Kesimpulan penting yang didapat dari tulisan ini adalah, bahwa *jengah* dengan transformasi nilai-nilai yang dikandungnya sangat diperlukan dalam masyarakat Bali (Hindu) kontemporer. Terlebih pada lingkungan aparatur pemerintahannya, yang dalam penelitian ini adalah pemerintahan provinsi Bali. Hal itu diperlukan dalam rangka menjaga kelangsungan hidup Bali dengan berbagai

aspek kehidupan yang dimilikinya. Khususnya, yang berkaitan dengan aset kulturalnya (*cultural capital*) atau modal kebudayaannya yang berlandaskan agama Hindu. *Jengah* dengan transformasi nilai-nilai yang dikandungnya sangat diperlukan dalam kehidupan Bali kontemporer untuk menghasilkan ketahanan (*resilience*) pada aspek kehidupannya, meliputi aspek geografi, demografi, sumber kekayaan alamnya, ideologi, politik, ekonomi, budaya, dan keamanannya.

Ada dua jawaban besar yang berhasil diperoleh tentang hasil dari transformasi nilai-nilai *jengah* di lingkungan aparat pemerintah Provinsi Bali. *Pertama*, hasil transformasi nilai-nilai *jengah* itu terhadap praktik penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Bali yang menghasilkan perwujudan *good governance*, tercermin pada praktik organisasi pemerintahan daerah di provinsi Bali yang memiliki semangat untuk berubah dan bersedia melakukan transformasi sosial, pemerintahan yang bersedia melakukan tata kelola pemerintahan yang bersih, terbuka, responsif, dan bertanggung jawab. *Kedua*, hasil transformasi nilai-nilai *jengah* terhadap praktik nasionalisme yang tercermin pada peningkatan praktik *transfer of loyalty* antar individu dan atau kelompok, untuk menghasilkan grand solidarity dalam menumbuhkan kejuangan, bersedia bersama-sama untuk mewujudkan kemajuan menggunakan ideologi nasionalisme, terkikisnya budaya feodal serta budaya patron-klien yang negatif di lingkungan aparat Pemprov Bali. Masing-masing dari dua pertanyaan pokok itu sepintas seperti terpisah, antara perwujudan *good governance* dengan praktik nasionalisme, namun sesungguhnya, keduanya merupakan satu kesatuan yang saling pengaruh mempengaruhi antara satu dengan lainnya atau *vice versa*, dan berujung pada terwujudnya sebuah kualitas keajegan atau ketahanan Bali pada bidang geografi, demografi, sumber kekayaan alamnya, ideologi, politik, ekonomi, budaya, dan keamanannya.

Ke depan, diperlukan tindakan nyata dalam meningkatkan kualitas *jengah* masyarakat Bali (Hindu) dalam rangka membangun dan memelihara aset kulturalnya yang berdasarkan agama Hindu. Kepemimpinan seorang tokoh dituntut mampu melakukan transformasi nilai-nilai *jengah* itu dalam berbagai aktivitas kepemimpinannya, untuk menghasilkan peningkatan daya saing. Karena *jengah* adalah perang, maka kamus takut seharusnya dibuang jauh-jauh atau

dalam bahasa Bali *joh uli jerih*, sadar bahwa ada ancaman di depan yang harus dihadapi dengan melakukan perubahan atau dalam bahasa Bali *eling nagata*, serta sadar untuk terus memohon petunjuk dan perlindungan Tuhan atau *Hyang Widi*. Berdasarkan itu, direkomendasi bahwa melakukan *jengah* berarti bersedia untuk “*jengah*” (akronim dari *joh uli jerih*, *eling nagata*, dan berserah diri kepada *Hyang Widi*).

DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, Nengah Bawa. 2010. *Ajeg Bali, Gerakan, Identitas, dan Globalisasi*. Yogyakarta: LKiS.
- Bagus, I Gusti Ngurah. 1970. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Bandem, I Made. 2006. "Menuju Kebangkitan Global Kebudayaan Indonesia (Peran Kebudayaan Dalam Peneguhan Ketahanan Nasional)". Orasi Ilmiah pada Peringatan HUT ke-41 Lemhannas-RI.
- Howe, Leo. 2005. *The Changing World of Bali, Religion, Society and Tourism*, The Taylor & Francis e-Library.
- Kembar Kerepun, Made. 2007. *Mengurai Benang Kusut Kasta, Membedah Kiat Pengajegan Kasta di Bali*. Denpasar: Panakom.
- Lemhannas-RI. *Ketahanan Nasional Indonesia*, Jakarta.
- Robinson, Geoffrey. 2005. *Sisi Gelap Pulau Dewata, Sejarah Kekerasan Politik*. Yogyakarta: LkiS.
- Weber, Max. 1946. *Sosiologi from Max Weber: essays in Sociology*. Oxford: Oxford University Press. Diterjemahkan oleh Noorkholis dan Tim Penerjemah Promothea. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Winardi. 2008. *Manajemen Perubahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Yudhis, M.Burhanudin. 2008. *Bali Yang Hilang Pendatang, Islam dan Etnisitas Bali*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.